



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 44/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi terintegrasi yang mudah pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Watampone;
c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud huruf a dan b diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan

- Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Jo 1-144/KMA/SK/I /2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang "Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal BADan Peradilan Agama";
 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Nomor 1403. b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Watampone
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH K.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 44/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra. Nurlinah, K, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah
3	Lukman Patawari, S.H.	Panitera	
4	Zainuddin, S.Ag.	Sekretaris	Penanggung Jawab
5	-Andi Suardi, S. Ag. -Wahyuni Isfa Aulia, A.Md -Andi Ulfyah Nur, S.Si.	-Panitera Muda Gugatan -Pengelola Penanganan Perkara -Honorer (PPNPN)	-Pelaksana Kasir -Petugas Kasir -Pendamping Petugas Kasir
6	-Bintang, S.H. -Metria Dwi Virahesti,A.Md.A.B. -Hermawati, S.H.	- Panitera Muda Permohonan -Pengelola Penanganan Perkara - Honorer	-Pelaksana Pendaftaran Perkara -Petugas Pendaftaran Perkara -Pendamping Petugas Pendaftaran Perkara
7	-Hayad Jusa, S.Ag. -Muafiyah, S.H. -Iriani, S.H.	-Panitera Muda Hukum -Analis Perkara Peradilan -Honorer	-Pelaksana Informasi, Pengaduan dan Operator Siwas -Petugas Informasi, Pengaduan dan Operator Siwas -Pendamping Petugas Informasi, Pengaduan dan Operator Siwas
8	-Hayad Jusa, S.Ag. -Nurfajriani, S.H. -Nur Islah Ugie Patawari, S.H.	-Panitera Muda Hukum -Analis Perkara Peradilan -Honorer	-Pelaksana Penyerahan Produk -Petugas Penyerahan Produk -Pendamping Petugas Penyerahan Produk
9.	-Andi Suardi, S. Ag. -Arridha Ahmad, S.Sy. -Dyta Nurul Yunus, S.H.	-Panitera Muda Gugatan -Analis Perkara Peradilan -Honorer	-Pelaksana Pojok Ecourt -Petugas Pojok Ecourt -Pendamping Petugas Pojok Ecourt

10	-Khumaeni, S.H.I., M.H. -Ahmad Amiruddin, S.Sy. -Muh. Haerul Huluk, S.H.I.	-Panitera Pengganti -Honorer (PPNPN) -Honorer	-Pelaksana Gugatan Mandiri -Petugas Gugatan Mandiri -Pendamping Petugas Gugatan Mandiri
12	-Saiful Bachri, S.H. -Sulaeman Hakim -M. Amin Firdaus, S.E.I. -Aksan Rijal -A. Achmad Hussain, S.H.	-Kasubag Umum dan Keuangan -Honorer -Honorer -Honorer (PPNPN) -Honorer	-Pelaksana Sidang/Antrian Sidang -Petugas Ruang Sidang I/ Antrian Sidang -Petugas Ruang Sidang II/ Antrian Sidang -Pendamping Petugas Sidang I/ Antrian Sidang -Pendamping Petugas Ruang Sidang II/ Antrian Sidang

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH K.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 44/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANA DAN PETUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

1. Pengarah bertugas :

- Membentuk tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengarahkan, membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh aparat pengadilan;
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit keja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengawasi dan mengevaluasi, membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidentil kepada penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Penanggungjawab bertugas :

- Membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim pejabat dan pegawai pengadilan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelola dengan baik;
- Berkoordinasi dan memberi petunjuk kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberika teguran kepada pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Pelaksana bertugas :

- Mengatur jadwal petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan dokumen data dan informasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyusun laporan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengoreksi hasil kerja petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya;
- Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Petugas bertugas :

- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
- Memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

